

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran. Selanjutnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan yang memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN/PHLN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, swasta serta sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarnya. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), dengan sumber penganggaran dari APBD Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan PPAS dan RAPBD.

Selanjutnya penyusunan KU-APBD Kabupaten Natuna Tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka menyediakan suatu pedoman dan atau petunjuk untuk kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan. Dalam kapasitasnya sebagai mediasi,

KU-APBD 2017 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penyusunan KU-APBD 2017 tetap mempertimbangkan kondisi Kabupaten Natuna dan kinerja APBD Tahun 2016 serta kemampuan nyata keuangan daerah, disamping mempertimbangkan kebutuhan yang berkembang secara sektoral di masyarakat yang diwadahi melalui penjangkaran aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Implementasi KU-APBD 2017 melalui RAPBD 2017 diharapkan dapat menjabarkan fungsi-fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Selain itu, KU-APBD 2017 diarahkan pula pada upaya mendorong perekonomian daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kegiatan penyediaan dan penanganan prasarana dasar, seperti infrastruktur permukiman dan fasilitas umum, perluasan lapangan kerja, penciptaan rasa aman dan ketertiban. Diharapkan kegiatan-kegiatan dapat menciptakan situasi kondusif bagi perekonomian daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017, dimaksudkan sebagai penjabaran skenario rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2017.

Tujuan penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Natuna Tahun 2017.
2. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2017.
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2017 agar berdayaguna dan berhasil guna.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2017, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016;
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016;
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017.

KU-APBD selanjutnya dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini bertujuan sebagai berikut :

- (1) Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan RAPBD;
- (2) Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Keserasian dan keselarasan penyaluran aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya daerah, asumsi makro ekonomi.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator makro ekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan pendapatan nasional yang tercermin pada nilai PDRB dari tahun ke tahun. Indikator yang lazim digunakan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil adalah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan yang menjadi petunjuk dari kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan percepatan pembangunan di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,25 persen, naik menjadi 6,74 persen di Tahun 2011 dan terus meningkat di tahun 2012 menjadi 6,81 persen. Tahun 2013 laju

pertumbuhan ekonomi masih meningkat mencapai 6,82 persen berbeda di Tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi perhitungan sementara turun menjadi 6,30 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi di karenakan beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami perlambatan yaitu lima sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, lapangan usaha Pertambangan dan pengalihan, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan pergudangan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi ditahun 2014 dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 9,26 persen. Kategori Informasi dan Komunikasi yang memiliki kontribusi terbesar kedua tumbuh cukup tinggi dengan pertumbuhannya sebesar 8,06 persen. Kategori Transportasi dan Pergudangan merupakan kategori terbesar ketiga yaitu 7,90 persen. Sedangkan yang keempat adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,54 persen. Kelima adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,52 persen. Sedangkan lapangan usaha ekonomi PDRB yang lainnya mencatat pertumbuhan yang positif.

2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi. Jika inflasi terlalu tinggi maka daya beli masyarakat akan menurun yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Secara umum laju inflasi nasional Maret 2015 sebesar 0,17 persen. Namun sesuai dengan kondisi real yang terjadi di lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat

pada Maret 2015 di Kabupaten Natuna terjadi inflasi sebesar 0,04 persen, sedangkan dua daerah tingkat dua lainnya di Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi yaitu Kota Batam sebesar -0,67 persen dan kota Tanjungpinang sebesar -0,45 persen. Inflasi di Kabupaten Natuna disebabkan oleh naiknya indeks harga kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 2,23 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 1,12 persen, kelompok sandang sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,70 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,04 persen. Laju inflasi tahun kalender Januari - Desember 2015 di Kabupaten Natuna sebesar 4,31 persen. Laju inflasi *'year on year'* Kabupaten Natuna sebesar 4,31 persen.

3. Tingkat Pengangguran

a. Kependudukan

Pertumbuhan penduduk yang cukup besar akan menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang ada. Hal ini kemudian membawa dampak semakin besarnya jumlah orang yang mencari pekerjaan ataupun jumlah orang yang menganggur.

Masalah kependudukan memiliki posisi penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta. Sebagai daerah yang sedang membangun aspek kependudukan bersifat dinamis dan akan terus mengalami perubahan. Pembangunan berbagai sektor berdampak pada perkembangan jumlah penduduk yang relatif pesat.

Sebagai daerah yang sedang membangun, Penduduk Kabupaten Natuna tahun 2014 berjumlah 73.470 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 37.891 (51,80%) dan penduduk perempuan berjumlah 37.067 (48,20%) dengan laju pertumbuhan pertahun 5,69%. Secara

keseluruhan kepadatan penduduk Kabupaten Natuna tahun 2014 sebesar 38,42 jiwa per km². Ini artinya dalam wilayah seluas 1 km² terdapat penduduk sekitar 38 jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Kecamatan Midai sebesar 213,79 jiwa per km² dan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Bunguran Utara sebesar 10,51 jiwa per km².

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah kecamatan Bunguran Timur dengan jumlah penduduk 25.760 jiwa dan yang terkecil adalah penduduk kecamatan Pulau Laut sebesar 2.400 jiwa.

Tabel. 1.
Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2014

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
<i>Subdistrict</i>	<i>Area</i>	<i>Population</i>	<i>Population Density</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Midai	26,10	5.065	194,06
2. Bunguran Barat	448,46	11.073	24,69
3. Bunguran Utara	404,71	3.936	9,73
4. Pulau Laut	37,69	2.400	63,68
5. Pulau Tiga	67,87	4.892	72,08
6. Bunguran Timur	146,83	25.760	17,54
7. Bunguran Timur Laut	235,01	4.395	18,70
8. Bunguran Tengah	172,71	2.953	17,10
9. Bunguran Selatan	233,99	2.569	10,98
10. Serasan	43,65	4.886	111,94
11. Subi	160,93	2.770	17,21
12. Serasan Timur	23,35	2.771	118,67
Jumlah	2001,30	73.470	36,71
<i>Total</i>			

Sumber : Natuna dalam angka Tahun 2015

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang, hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengatasi itu perlu dilakukan penyerapan tenaga kerja semaksimal mungkin.

b. Kesempatan Kerja

Sektor pertanian dan sektor jasa masih menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk yang masing-masing mencapai 9.122 orang dan 8.372 orang. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Natuna pada tahun 2014 mencapai 7,6 persen dapat dilihat pada Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2.
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	7.155	1.967	9.122
2. Pertambangan dan Penggalian	451	0	451
3. Industri Pengolahan	1.111	794	1.905
4. Listrik, Gas & Air Bersih	145	0	145
5. Bangunan/konstruksi	3.403	0	3.403
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	2.302	2.520	4.822
7. Pengangkutan & Komunikasi	1.427	143	1.570
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	271	172	443
9. Jasa - Jasa	4.498	3.874	8.372
Jumlah	20.763	9.470	30.233

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Natuna

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan kualitas kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menempatkannya sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Perhitungan IPM dengan Metode baru di Kabupaten Natuna dari tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Natuna tahun 2014 sebesar 70,06. Dalam kurun waktu lima tahun, IPM Kabupaten Natuna mengalami peningkatan hingga 5,69 persen. Hal ini bisa menjadi indikasi cukup berhasilnya program-program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia yang diharapkan. Angka IPM Kabupaten Natuna terus meningkat di setiap tahunnya, pada Tahun 2010 sebesar 66,29, Tahun 2011 sebesar 67,76, Tahun 2012 sebesar 68,80, tahun 2013 sebesar 69,39 pada tahun 2014 sebesar 70,06. Angka IPM ini dipengaruhi oleh komponen-komponen sebagai berikut.

1. Angka harapan hidup saat lahir sebesar 63,24 tahun.
2. angka harapan lama sekolah sebesar 13,84 tahun
3. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,07 tahun.
4. Pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar Rp. 13,414,000 setahun

Dengan capaian IPM yaitu sebesar 70,06 pada tahun 2014, saat ini Kabupaten Natuna menempati peringkat 4 se-provinsi Kepulauan Riau.

Tabel. 3.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kab. Natuna, 2010-2014

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,31	68,37	68,43	68,57	63,24
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,33	13,08	13,29	13,50	13,84
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,06	7,33	7,75	7,87	8,07
Pengeluaran Rata-rata Perkapita (Ribu Rp)	12.958	13.101	13.253	13.389	13.414
IPM	66,29	67,76	68,80	69,39	70,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Berbagai program pembangunan pendidikan secara berkala telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Natuna antara lain program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan luar sekolah, program peningkatan mutu pendidik dan mutu pendidikan dan program lain yang terkait dengan bantuan pendidikan seperti beasiswa, bagus, bross, insentif bagi tenaga pengajar dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi.

Keberhasilan pendidikan dapat diukur dari beberapa indikator antara lain adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (EYS), Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dan Pengeluaran Perkapita. Kabupaten Natuna pada Tahun 2014 memiliki nilai AHH sebesar 63,24 tahun angka harapan lama sekolah sebesar 13,84 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna mencapai 8,07 tahun. Dan pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar Rp.13.414.000 setahun

Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) sebesar 13,84 tahun. Artinya, ketika seorang anak masuk sekolah SD pada usia 7 tahun, diharapkan anak tersebut akan mampu bertahan untuk melanjutkan sekolahnya hingga perguruan tinggi setara diploma I. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Natuna dari tahun 2010 hingga tahun 2014 meningkat. Pada tahun 2010, harapan lama sekolah sebesar 12,33 tahun sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 12,25 persen menjadi 13,84 persen

Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 15 tahun ke atas di kabupaten Natuna pada tahun 2014 sebesar 8,07 tahun. Artinya penduduk kabupaten Natuna yang berusia diatas 15 tahun rata-rata memiliki tingkat pendidikan terakhir setara kelas 2 SMP/SLTP.

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2017.

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor riil dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2017. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Tabel. 4.
Target Ekonomi Makro Kabupaten Natuna TA. 2017

No	Indikator	2015	2016	2017
1	PDRB ADHB (jutaan rupiah)	4.421.470,4	4.946.334,38	5.513.144,4
2	PDRB ADHK (jutaan rupiah)	3.467.118,6	3.467.712,35	3.771.935,19
3	LPE	5,88 %	6,56 %	6,55 %
4	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	59,333	65,09	71.39
5	PDRB perkapita ADHK (rupiah)	46,526	48.62	48.84

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2017 maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi revitalisasi dan peningkatan produktifitas sektor Perikanan, kelautan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
2. Peningkatan peran Usaha Kecil Menengah dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
3. Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dan memiliki daya saing;
4. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
5. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan serta pelebaran jalan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan program Tol Laut yang menghubungkan wilayah antar kabupaten dan kecamatan di daerah Kabupaten Natun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah untuk mendukung pengembangan dan kemajuan ekonomi;
6. Usaha peningkatan investasi dan akses pasar di setiap kecamatan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;

7. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2017 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2017.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap mendukung program "**NAWACITA**" sebagai wujud pembangunan nasional tahun 2017. Unsur-unsur pokok dalam Nawacita tersebut adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada tahun 2017 arah pembangunan nasional dan program strategis nasional melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **"mengacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah"**. Yang juga diselaraskan dengan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dengan Visi **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**.

3.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tahun 2017 ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,5 persen, lebih tinggi dari tahun 2016. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang. Faktor lain harga komoditas diperkirakan masih tetap rendah sementara inflasi global diperkirakan cenderung stabil. Pada tahun 2017 perekonomian global masih dihadapkan berbagai tantangan resiko arus balik modal dan resiko geopolitik yang tinggi. Sementara itu ekonomi domestic juga masih dihadapkan pada berbagai resiko potensial GDP turun dan resiko dari sisi fiskal. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 diperkirakan dapat mencapai 5,5 – 5,9 persen.

Tabel.5

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2017

PENGELUARAN	TAHUN 2017 (%)
Konsumsi Masyarakat	5,4 - 5,5
Konsumsi Pemerintah	5,6 - 6,7
PMTB (Investasi)	6,0 - 6,6
Ekspor	4,5 - 5,0
Impor	4,3 - 4,8
PDB	5,8

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dari sisi permintaan, pemulihan ekonomi global baik di AS dan Uni Eropa mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,5 – 5,0 persen terutama produk nonmigas, yang didorong oleh : 1. Meningkatnya efektifitas diplomasi perdagangan 2. Meningkatnya efektifitas market intelligence, promosi dan asistensi ekspor, serta 3. Pengembangan fasilitasi ekspor produk manufaktur. Membaiknya iklim investasi dan peluang pasar pasar domestic yang luas mendorong investasi tumbuh 6,0 – 6,6 persen yang didukung oleh: 1. Kemudahan dalam perizinan berinvestasi melalui deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah 2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing usaha dan 3. Meningkatkan peran daerah dalam menarik investasi. Tingkat inflasi yang stabil di kisaran 4,0 persen akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan mendorong konsumsi masyarakat 5,4-5,5 persen. Konsumsi pemerintah tumbuh 6,7 persen yang didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program-program pembangunan yang semakin efisien.

Dari sisi penawaran, industry pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh 4,2-4,3 persen, yang didorong oleh : 1. Meningkatnya produksi tanaman pangan 2. Meningkatnya tanaman perkebunan yang didorong oleh permintaan minyak kelapa sawit dalam negeri 3. Suplay daging sapi dan unggas yang semakin baik dengan didorong alat transportasi antar pulau

4. Kenaikan produksi penangkapan ikan, budidaya perikanan dan juga produk olahan perikanan terutama didorong oleh penegakan hukum dan pembangunan olahan hasil perikanan.

Industry pengolahan diperkirakan akan tumbuh antara 6,2-6,5 persen yang didorong oleh ketersediaan dan kualitas bahan baku, infrastruktur dan energy yang memadai, pemberian insentif fiskal yang harmonis, sumberdaya manusia industry yang kompeten, peningkatan penanaman modal, pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif, hubungan industrial yang bersahabat dan peningkatan akses ke pasar modal.

Kinerja neraca pembayaran Indonesia diperkirakan membaik ditopang oleh perbaikan pada neraca transaksi modal dan finansial terutama sumbangan dari investasi langsung luar negeri (PMA) yang mengalami peningkatan. Perbaikan iklim investasi yang diiringi dengan regulasi yang mendorong kepercayaan investor luar negeri, memungkinkan PMA dan investasi portopolio untuk meningkat di tahun 2017. Kinerja ekspor diperkirakan membaik, tetapi impor nonmigas diperkirakan akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi, didorong oleh permintaan domestic yang meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik serta percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Kondisi ini akan meningkatkan defisit transaksi berjalan tetapi dalam tingkat yang terjaga.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan domestic akan berpengaruh terhadap kinerja APBN tahun 2017. Pada sisi penerimaan, pendapatan Negara diperkirakan mencapai 13,9 persen PDB dengan penerimaan perpajakan sebesar 12,0 persen PDB, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,8 persen PDB. Sementara itu belanja negara tahun 2017 diperkirakan mencapai 16 persen PDB terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10 persen PDB dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar 6 persen PDB. Dengan perkiraan pendapatan dan belanja Negara tersebut, defisit anggaran tahun 2017 diperkirakan mencapai

sebesar 2,2 persen dari PDB. Defisit anggaran tersebut akan dibiayai melalui pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di tahun 2017 diperkirakan sebesar 6,0-6,7 persen. Kebutuhan investasi tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp. 4.498,0 – 4.617,0 triliun. Kebutuhan dana tersebut berasal dari investasi pemerintah dan investasi masyarakat yang masing-masing menyumbang 11,3 persen dan 88,7 persen. Sumber investasi pemerintah berasal dari pengeluaran modal pemerintah sedangkan investasi masyarakat dari sektor perbankan, obligasi pemerintah dan aliran modal asing.

b. Harga dan *Lifting* Minyak

Pergerakan harga minyak mentah (ICP) diperkirakan akan tetap mengikuti perkiraan harga minyak mentah di pasar dunia. Secara umum harga minyak dunia diperkirakan akan terus meningkat, namun masih dibawah US\$100 per barel dan harga minyak ICP pada tahun 2017-2019 akan bergerak pada kisaran US\$60- US\$100 per barel. Untuk tahun 2017-2019 *lifting* minyak diperkirakan akan mencapai kisaran 600 ribu hingga 780 ribu barel perhari dan *lifting* gas bumi diperkirakan mencapai kisaran 1.100 ribu hingga 1.300 ribu barel per hari.

Berdasarkan data tahun 2010, total cadangan gas Indonesia diperkirakan mencapai 157,14 triliun standar kaki kubik (*trillion standard cubic feet/tscf*) atau sekitar 3,0 persen dari cadangan gas dunia, yang terdiri atas cadangan terbukti 108,4 tscf dan cadangan potensial 48,74 tscf. Di lain pihak, *lifting* minyak bumi di tahun 2017 diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari.

c. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Dalam penyusunan APBNP tahun 2015 pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan fiscal seperti kebijakan di bidang pendapatan Negara, belanja Negara, dan pembiayaan anggaran, strategi dan kebijakan tersebut untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui optimasi

pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha. Upaya pemerintah dalam mengamankan target penerimaan pajak tahun 2015 antara lain melalui penggalan potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan wajib pajak baru, dan penegakan hukum.

d. Nilai Tukar Rupiah

Pemerintah melalui Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati, pengawasan lalu lintas devisa, serta pengembangan dan pendalaman pasar keuangandomestik. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar, mencegah volatilitas yang berlebihan, dan menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Penerapan bauran kebijakan makro prudensial seperti melalui penerapan instrumen *term deposit* diharapkan dapat menjaga agar arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia yang masih relatif besar sehingga dapat memberinilai manfaat bagi pembangunan ekonomi. Ke depan, tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah akan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia serta perlambatan ekonomi di Cina, India dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara *emerging market* dan mendorong terjadinya *flight to quality*. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi pada kisaran Rp. 13.700 – Rp.14.200 per dolar AS pada tahun 2017.

e. Inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen

(IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi. Jika inflasi terlalu tinggi maka daya beli masyarakat akan menurun yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Secara umum laju inflasi nasional Maret 2015 sebesar 0,17 persen. Namun sesuai dengan kondisi real yang terjadi di lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2015 di Kabupaten Natuna terjadi inflasi sebesar 0,04 persen, sedangkan dua daerah tingkat dua lainnya di Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi yaitu Kota Batam sebesar -0,67 persen dan kota Tanjungpinang sebesar -0,45 persen. Inflasi di Kabupaten Natuna disebabkan oleh naiknya indeks harga kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 2,23 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 1,12 persen, kelompok sandang sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,70 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,04 persen. Laju inflasi tahun kalender Januari - Desember 2015 di Kabupaten Natuna sebesar 4,31 persen. Laju inflasi 'year on year' Kabupaten Natuna sebesar 4,31 persen.

f. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga SPN 3 bulan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi aliran modal masuk melalui penanaman modal asing dan suku bunga Bank sentral AS. Dampak *tapering off* yang dilakukan Bank Sentral AS serta pemulihan ekonomi dunia yang masih dibayangi oleh tekanan akibat krisis eropa menyebabkan terjadinya persaingan untuk mendapatkan likuiditas global. Kondisi ini mendorong peningkatan tingkat suku bunga SPN 3 bulan untuk menarik aliran modal masuk. Masa jatuh tempo 3 bulan menjadi daya tarik investor karena investor dapat mengalihkan dananya ke instrument lain yang

lebih menguntungkan dengan waktu singkat. Faktor internal yang paling mempengaruhi SPN 3 bulan yaitu BI rate dan inflasi. Apabila BI rate naik maka suku bunga SPN akan ikut naik jika suku bunga turun maka suku bunga SPN akan cenderung turun. Suku bunga SPN juga dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi.

Walaupun menghadapi tekanan, namun ketertarikan investor terhadap obligasi pemerintah masih tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan asing yang terus meningkat pada surat berharga Negara (SBN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*). Porsi kepemilikan asing pada SBN tradable pada 12 desember 2014 tercatat mencapai 38,6 persen dengan nilai nominal sebesar Rp. 470,0 triliun atau lebih tinggi disbanding posisinya pada akhir tahun 2013 yang mencapai 32,5 persen dengan nominal Rp. 323,9 triliun.

Suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2016 diprediksikan sebesar 6,3% relative sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan suku bunga APBNP tahun 2015 sebesar 6,2%. Hal tersebut masih didasarkan pada antisipasi kenaikan suku bunga the Fed yang akan mendorong penarikan aliran dana likuiditas sehingga turut mendorong penarikan aliran dana likuiditas sehingga turut memberikan tekanan pada pergerakan suku bunga SPN 3 bulan. Selain kenaikan suku bunga SPN 3 bulan ini pun bisa terjadi karena pengaruh masih tingginya besaran nilai inflasi. Disamping itu program pemerintah yang focus pada sektor riil khususnya pembangunan infrastruktur sehingga menekan suku bunga SPN 3 bulan meningkat.

3.2 Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Sebagai daerah yang sedang membangun, Penduduk Kabupaten Natuna tahun 2014 berjumlah 73.470 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 37.891 (51,80%) dan penduduk perempuan berjumlah 37.067 (48,20%) dengan laju pertumbuhan pertahun 5,69%. Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kabupaten Natuna tahun 2014

sebesar 38,42 jiwa per km². Ini artinya dalam wilayah seluas 1 km² terdapat penduduk sekitar 38 jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Kecamatan Midai sebesar 213,79 jiwa per km² dan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Bunguran Utara sebesar 10,51 jiwa per km².

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang, hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengatasi itu perlu dilakukan penyerapan tenaga kerja semaksimal mungkin.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna menunjukkan tren kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Besaran nilai PDRB dapat menentukan struktur perekonomian suatu daerah. Struktur perekonomian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi, dengan mengamati struktur perekonomian akan tampak seberapa besar kekuatan ekonomi suatu negara atau daerah. Indikator makro semacam ini sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk menentukan arah dan sasaran kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal tersebut juga menunjukkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonominya. Makin besar nilai tambah yang dapat diraih oleh suatu sektor maka semakin besarlah peranannya dalam perekonomian daerah tersebut. Besaran peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

Tabel. 6.
Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Natuna Tahun 2010 – 2014 (Persen)

Lapangan Usaha/Industry	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44.81	42.63	42.19	41.82	40.36
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	13.12	12.28	11.69	11.34	10.98
a. Tanaman Pangan	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
b. Tanaman Hortikultura	0.42	0.40	0.39	0.36	0.39
c. Tanaman Perkebunan	11.23	10.50	10.00	9.68	9.23
d. Peternakan	1.20	1.11	1.06	1.06	1.12
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.20	0.21	0.19	0.18	0.17
3 Perikanan	31.48	30.14	30.30	30.31	29.20
B Pertambangan dan Penggalian	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
3 Pertambangan Biji Logam	-	-	-	-	-
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49
C Industri Pengolahan	3.13	3.05	2.97	2.90	2.85
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
2 Industri Makanan dan Minuman	0.94	0.92	0.88	0.86	0.82
3 Industri Pengolahan Tembaku	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.29	0.26	0.26	0.24	0.25
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.55	0.52	0.54	0.54	0.56
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16
10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.54	0.55	0.53	0.52	0.50
11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14 Industri Alat Angkutan	0.40	0.41	0.38	0.37	0.35
15 Industri Furnitur	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Perbaikan dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.34	0.38	0.40	0.38	0.34
1 Ketenagalistrikan	0.09	0.07	0.07	0.06	0.04
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.26	0.30	0.33	0.33	0.30
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
F Konstruksi	23.44	26.11	26.54	26.95	27.57
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.30	9.59	9.52	9.31	9.61
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.05	2.07	1.98	1.98	1.97
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	7.24	7.52	7.54	7.33	7.64
H Transportasi dan Pergudangan	1.90	1.93	2.05	2.26	2.78
1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2 Angkutan Darat	0.36	0.35	0.35	0.36	0.39
3 Angkutan Laut	0.71	0.70	0.74	0.77	0.82
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
5 Angkutan Udara	0.71	0.78	0.87	1.04	1.47
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.58	1.53	1.55	1.58	1.61
1 Penyediaan Akomodasi	0.15	0.15	0.16	0.16	0.23
2 Penyediaan Makan Minum	1.43	1.38	1.39	1.41	1.38
J Informasi dan Komunikasi	2.41	2.22	2.16	2.05	2.02
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0.49	0.47	0.45	0.42	0.43
1 Jasa Perantara Keuangan	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.49	0.47	0.44	0.42	0.42
3 Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-
4 Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-
L Real Esta	2.35	2.26	2.25	2.16	2.17
M,N Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.62	7.32	7.41	7.68	7.79
P Jasa Pendidikan	0.64	0.60	0.63	0.64	0.65
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.18	1.12	1.10	1.08	1.08
R,S,T,U Jasa lainnya	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	100	100	100	100	100

Sumber : Sosial Ekonomi Kab. Natuna Tahun 2015

Struktur lapangan usaha apabila dilihat dari PDRB Tanpa Migas yang memberikan sumbangan terbesar di tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kemudian lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup Sub lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Sub lapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub lapangan Usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 40,36 persen ditahun 2014. Besarnya peranan lapangan usaha ini didukung oleh peranan Sub lapangan usaha Perikanan yang nilai tambahnya menyumbang sebesar 29,20 persen.

Pada tahun 2014 kategori konstruksi menyumbang sebesar 27,57 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna, meningkat dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 23,44 persen. Trend peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun-tahun di antaranya (2011-2013) yaitu sebesar berturut-turut 26,11 persen, 26,54 persen, dan 26,95 persen.

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang rata-rata 9 persen. Pada tahun 2014, kontribusi kategori ini sebesar 9,61 persen, dengan sebesar 7,64 persen disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sebesar 1,97 persen disumbangkan oleh lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2010-2014 peranannya relatif stabil dengan rata-rata 7 persen.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2017 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas

Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
 5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sisduur penagihan PDRD dan PBB.
 3. Operasional pemungutan PBB.
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisduur administrasi pemungutan.
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil

- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

4.2 BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

4.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan

(SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD

Tabel. 7. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Natuna.

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET ANGGARAN TAHUN BERKENAN	DASAR HUKUM
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	44.420.798.233	
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	5.186.050.000	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	562.895.000	
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.150.000.000	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan	33.521.853.233	
4.2	Dana Perimbangan	863.078.939.667	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak	193.220.967.000	
	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	127.636.095.000	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	355.642.550.000	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	186.579.327.667	
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	116.217.262.100	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	45.224.011.100	
4.3.6.	Dana Desa	70.993.251.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.023.717.000.000	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI,
BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL,
BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
5.1.1.	Belanja Pegawai	373.100.613.400
5.1.4.	Belanja Hibah	1.336.000.000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	574.895.000
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	139.143.212.000
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
	JUMLAH PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	516.154.720.400

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
6.	PEMBIAYAAN	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00

BAB.V PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2017 merupakan masa transisi antara visi misi periode 2011-2016 dengan visi misi bupati terpilih periode 2016-2021. Sehingga KU-APBD tahun 2017 merupakan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang belum tercapai pada periode Tahun 2011 – 2016 yang kemudian akan di giring ke dalam tujuan dan sasaran periode tahun 2016-2021. Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2017.

Demikian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017.